

JURNAL

KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI

KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 14	No. 2	Hal. 93 - 182	Jakarta Desember 2024	ISSN 2089-6980
--------------------------------	---------	-------	---------------	--------------------------	-------------------

Terakreditasi RISTEKDIKTI : **200/M/KPT/2020**

Diterbitkan bersama :



Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan



Jaringan Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 14 Nomor 2, Desember 2024

Penanggung Jawab :

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:

Dr. Irwan Muliawan (*Ekonomi Sumber Daya*)

Anggota:

Prof. Dr. Harsuko Riniwati (*Sosial Ekonomi Perikanan*)

Prof. Dr. Ir. Ketut Sukiyono., DipAgEc. MEc, (*Ekonomi Pertanian*)

Dr. Armen Zulham (*Sistem Usaha Perikanan*)

Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si. (*Dinamika Populasi & Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan*)

Dr. Rani Hafsaridewi, S.K.M., M.Si. (*Sistem Usaha Perikanan*)

Dr. Achmad Rizal (*Sosial Ekonomi Perikanan*)

Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Redaksi Pelaksana :

Sinta Nurwijayanti, M.A.

Dr. Subhechanis Saptanto

Rizki Aprilian Wijaya, M.T.

Freshty Yulia Arthatiani, M.Si

Rahadi Susetyo Friendly Muhammad, S.I.Kom.

Badzlina Balqis, S.TP

Desain dan Tata Letak :

Ilham Ferbiansyah, S. Kom.

Alamat Redaksi :

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung BRSDM KP II Lt. 2

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924

Email: kebijakan.rosek@gmail.com

Jurnal Online: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi No. 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Kebijakan Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Budi Daya Udang di Kabupaten Lampung Selatan; (ii) Pemetaan Spasial Hasil Tangkapan Tuna Untuk Mendorong Program Pemerintah Tepat Sasaran (Studi Kasus: Maluku Utara); (iii) Kajian Komoditas Unggulan Aquaculture Kabupaten Sumenep Jawa Timur; (iv) Dampak Delimitasi Maritim Terhadap Masyarakat Pesisir di Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat; (V) Kesiadaan Masyarakat Untuk Menerima Hilangnya Fungsi Keberadaan Ekosistem Pantai di Kabupaten Wakatobi; (vi) Analisis Dampak Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/Permen-KP/2021 Terhadap Kegiatan Perikanan Purse Seine di Kabupaten Indramayu, dan; (vii) Dinamika Jejaring Sistem Sosial-Ekologi di Kawasan PAAP Kepulauan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara: Pemahaman Holistik untuk Transformasi Berkelanjutan.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP) menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Mitra Beestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 14 Nomor 1, Desember 2024 adalah:

1. Prof. Dr. Rilus A Kinseng (*Sosiologi Pedesaan Kebijakan - IPB University*)
2. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, MH (*Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - Universitas Syiah Kuala*)
3. Achmad Zamroni, Ph.D (*Pengelolaan Wilayah Pesisir - Badan Riset Inovasi Nasional*)
4. Dr. Ir. Edi Susilo, MS (*Sosiologi Perikanan - Universitas Brawijaya*)
5. Maulana Firdaus, Ph.D (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
6. Abdul Malik, S.T., M.Si., Ph.D. (*Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan - Universitas Negeri Makassar*)
7. Drs. Kusnadi, M.A (*Antropolog Maritim - Universitas Jember*)
8. Tenny Apriliani, M. Si (*Sistem Usaha Perikanan - Badan Riset Inovasi Nasional*)
9. Dr. Najamuddin, ST, M.Si (*Ilmu Kelautan dan Lingkungan - Universitas Khairun*)
10. Hakim Miftakhul Huda, M. Si (*Sistem Usaha Perikanan - Badan Riset dan Inovasi Nasional*)
11. Estu Sri Luhue, M. Si (*Ekonomi Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
12. Permana Ari Soejarwo, M.T (*Dinamika Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
13. Christina Yuliati, M. Si (*Sosial Budaya - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
14. Andi Alamsyah Rivai, S. Pi, M. SI (*Ilmu Kelautan dan Lingkungan- Universitas Negeri Makassar*)

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 14 Nomor 2, Tahun 2024

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI	iii
 Kebijakan Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Budi Daya Udang di Kabupaten Lampung Selatan <i>Oleh : Radityo Pramoda, Budi Wardono, Sumaryanto, Dadan Permana dan Nensyana Shafitri</i>	93 - 109
 Pemetaan Spasial Hasil Tangkapan Tuna Untuk Mendorong Program Pemerintah Tepat Sasaran (Studi Kasus: Maluku Utara) <i>Oleh : Utriweni Mukhaiyar, Febrina Puspa Sari, Bagas Caesar Suberlan dan Silmie Yashifa Eldhyawati</i>	111 - 123
 Kajian Komoditas Unggulan Aquaculture Kabupaten Sumenep Jawa Timur <i>Oleh : Nor Qomariyah, Dwi Ratna Hidayati, Mokh. Rum</i>	125 - 133
 Dampak Delimitasi Maritim Terhadap Masyarakat Pesisir di Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat <i>Oleh : Muhammad Salman Alfarisi, Muhammad Rafi Darajati dan Evi Purwanti</i>	135 - 142
 Kesediaan Masyarakat Untuk Menerima Hilangnya Fungsi Keberadaan Ekosistem Pantai di Kabupaten Wakatobi <i>Oleh : Ardiman Rusli, Eva Anggraini dan La Ode Muhammad Yasir Haya</i>	143 - 154
 Analisis Dampak Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/Permen-KP/2021 Terhadap Kegiatan Perikanan Purse Seine di Kabupaten Indramayu <i>Oleh : Maulana Dimas Firmansyah, Asep Agus Handaka Suryana, Anta Maulana Nasution dan Ine Maulina</i>	155 - 169
 Dinamika Jejaring Sistem Sosial-Ekologi di Kawasan PAAP Kepulauan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara: Pemahaman Holistik untuk Transformasi Berkelanjutan <i>Oleh : Mubamad Ariston, Luky Adrianto, Dietriech G Bengen dan Handoko Adi Susanto</i>	171 - 182

Kebijakan Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Budi Daya Udang di Kabupaten Lampung Selatan

Regional and Institutional Development Policy for Shrimp Aquaculture in South Lampung Regency

Radityo Pramoda, Budi Wardono, Sumaryanto, Dadan Permana dan Nensyana Shafitri

ABSTRAK

Kebijakan pengembangan kelembagaan kawasan budi daya udang yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, memiliki manfaat terhadap perekonomian daerah dan nasional. Penguatan peran kelembagaan pembudidaya udang di Kabupaten Lampung Selatan diperlukan untuk menjadikan wilayah ini sebagai pusat produksi unggulan, mendukung kesejahteraan masyarakat setempat, serta menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Penelitian kualitatif ini bertujuan menelaah kebijakan dalam mengembangkan budi daya udang di Kabupaten Lampung Selatan serta kelembagaan guna menciptakan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan mengoptimalkan manfaat ekonominya. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus yang dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur kawasan budi daya udang berbasis korporasi; 2) manajemen usaha perlu dibenahi; 3) Kabupaten Lampung Selatan mempunyai peluang besar dibangun kawasan budi daya udang dan korporasi. Rekomendasi kebijakan kajian ini: 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun Peraturan Menteri, terkait pedoman pengembangan kawasan budi daya udang berbasis korporasi; 2) pemerintah pusat dan daerah memberikan sosialisasi rutin, mengenai korporasi; 3) pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder, bersinergi mengawal pengembangan kawasan budi daya udang berlandaskan korporasi sesuai tujuan yang diharapkan.

Kata Kunci: kebijakan; pengembangan kawasan; kelembagaan; budi daya; udang

ABSTRACT

The policy of developing institutional frameworks for an integrated shrimp farming area, from upstream to downstream, provides benefits to both regional and national economies. Strengthening the institutional role of shrimp farmers in South Lampung Regency is essential to transform the region into a leading production center, support the well-being of local communities, and ensure long-term environmental sustainability. This qualitative study aims to examine the policies related to shrimp farming development in South Lampung Regency, as well as the institutional frameworks required to create sustainable area management and optimize its economic benefits. This research aims to structure the right policies for developing shrimp aquaculture and institutions, a strategic step to creating sustainable area management and optimal economic benefits. This qualitative research examines policies on shrimp aquaculture areas and institutions in South Lampung Regency. The analytical method used is empirical juridical, with a case study approach described descriptively. The results of the study show: The government still needs to have regulations governing corporation-based shrimp aquaculture areas; Business management needs to be improved; South Lampung Regency has a great opportunity to develop shrimp aquaculture areas and corporations. Policy recommendations for this study are as follows: The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries prepares a Ministerial Regulation regarding guidelines for developing corporate-based shrimp aquaculture areas; The local government provides assistance and training to increase the capacity of cultivators; The central government, regional governments, and stakeholders synergize to oversee the development of shrimp aquaculture areas based on the corporation according to the expected goals.

Keywords: policy; regional development; institutions; aquaculture; shrimp

Pemetaan Spasial Hasil Tangkapan Tuna Untuk Mendorong Program Pemerintah Tepat Sasaran
(Studi Kasus: Maluku Utara)

Spatial Mapping of Tuna Catch Production to Encourage Targeted Government Aid (Case Study: Maluku Utara)

Utriweni Mukhaiyar, Febrina Puspa Sari, Bagas Caesar Suherlan dan Silmie Yashifa Eldhyawati

ABSTRAK

Data produksi tuna Tahun 2019, 2020, dan 2021 di Provinsi Maluku Utara (Malut) dapat dipetakan secara spasial sehingga terlihat bahwa penambahan jumlah kapal dengan jenis dan ukuran tertentu akan menyebabkan peningkatan atau penurunan hasil produksi tuna. Jenis dan ukuran kapal merupakan variabel penjelas dengan kecenderungan memiliki pengaruh besar terhadap hasil produksi tuna berdasarkan nilai R^2 dan CP Mallow's. Selain jenis dan ukuran kapal, variabel penjelas lainnya adalah alat tangkap dan lokasi pendaratan ikan. Hasil pemetaan spasial menggunakan pendekatan *Geographically Weighted Regression* (GWR) ini menunjukkan pola yang berbeda setiap tahunnya. Kecuali, pada beberapa kabupaten seperti Halmahera Barat, Kepulauan Sula, dan Pulau Morotai yang cukup konsisten menunjukkan bahwa peningkatan produksi tuna terjadi jika ada penambahan kapal penangkap ikan ukuran di bawah 10 GT. Daerah-daerah ini merupakan produsen tuna tertinggi di Prov Malut. Penambahan produksi tuna tertinggi mencapai 450 ribu ton pada Tahun 2019 di Kepulauan Sula, 350 ribu ton pada 2020 di Pulau Morotai, dan 400 ribu ton pada 2021 di Halmahera Barat. Potensi tuna yang melimpah ini harus dijaga dan didukung dengan tata kelola yang baik oleh Pemerintah. Hasil analisis spasial tentang potensi produksi tuna ini dapat menjadi rekomendasi dalam menentukan daerah tujuan bantuan kapal perikanan beserta alat tangkapnya sehingga bantuan tersebut lebih efektif dan tepat sasaran. Daerah tujuan bantuan alat tangkap dan kapal perikanan paling direkomendasikan adalah daerah yang produksi tunanya paling melimpah, dengan catatan memperhatikan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

Kata Kunci: pemetaan spasial; *geographically weighted regression*; Maluku Utara; tuna; perikanan tangkap; bantuan pemerintah; alat tangkap ikan; kapal ikan

ABSTRACT

Tuna production data for 2019, 2020, and 2021 in North Maluku (Malut) Province can be mapped spatially so that it will be showed that the increase of the number of a certain fishing vessel type and size will lead to the increase or decrease of tuna. Fishing vessel type and size which are as the explanatory variables tend to have more influence on tuna production based on the R^2 -square and CP Mallow's. Apart from vessel type and size, other explanatory variables are fishing gear and fish landing sites. The results of spatial mapping using the *Geographically Weighted Regression* (GWR) approach show a different pattern each year. However, several regencies such as Halmahera Barat, Sula Islands, and Morotai Island are the potential areas if the number of operations of fishing vessels under 10 GT size is added. Additional tuna production could reach 450 thousand tons in 2019 in the Sula Islands, 350,000 tons in 2020 on Morotai Island, and 400 thousand tons in 2021 on Halmahera Barat. The abundant tuna potential of Malut Province has to be maintained and supported by a good governance by the Government. This spatial mapping information about tuna production can be used as a recommendation in determining the government aid target areas of fishing vessel and its fishing gear so that will lead to be more effective and targeted. The recommended target area of fishing gear and vessels are the area with the most abundant tuna production. The abundance of tuna production take the measured fishing policy into account.

Keywords: *spatial mapping; geographically weighted regression; Maluku Utara; tuna; capture fisheries; government aid; fishing gear; fishing vessel*

Kajian Komoditas Unggulan Aquaculture Kabupaten Sumenep Jawa Timur

A Study on Leading Commodities in the Aquaculture Subsector in Sumenep Regency, East Java

Nor Qomariyah, Dwi Ratna Hidayati, Mokh. Rum

ABSTRAK

Penentuan komoditas unggulan merupakan salah satu langkah awal dalam mewujudkan pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komoditas unggulan sub sektor perikanan budi daya di Kabupaten Sumenep yang mempunyai prospek dan daya saing yang tinggi untuk di kembangkan guna peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Metode analisis data menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *Typologi Klassen* dan Analisis *Shift Share* (SS). Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi data time series produksi komoditas perikanan budi daya Kabupaten Sumenep dan Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa rumput laut merupakan satu-satunya komoditas basis dengan nilai LQ >1, Analisis DLQ menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas perikanan budi daya di Kabupaten Sumenep memiliki prospek pengembangan di masa depan kecuali ikan kerapu. *Typologi Klassen* mengindikasikan perlunya perhatian lebih pada komoditas yang terdapat pada kuadran II, yakni pada komoditas yang memiliki pertumbuhan cepat namun kontribusi rendah, seperti lele, nila, bandeng, udang, dan ikan lainnya. Analisis *shift-share* menunjukkan bahwa komoditas rumput laut, bandeng, dan ikan lainnya termasuk dalam kategori pertumbuhan lambat, sementara komoditas gurame, lele, nila, kerapu, dan udang memiliki pertumbuhan progresif meskipun nilai *Location Quotient* (LQ) rendah. Penelitian ini merekomendasikan Upaya pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kebijakan pembiayaan dan investasi yang dapat memengaruhi laju pertumbuhan perikanan budi daya agar mampu mempunyai daya saing yang tinggi melalui kebijakan seperti revitalisasi, industrialisasi, dan standarisasi.

Kata Kunci: komoditas unggulan; perikanan budi daya; Sumenep; location quotient; shift share & typologi klassen

ABSTRACT

Determining superior commodities is one of the first steps in realizing sustainable economic development. This research aims to determine the superior commodities of the aquaculture sub-sector in Sumenep Regency which have high prospects and competitiveness to be developed in order to improve the economy and welfare of the community. The data analysis method uses *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *Klassen Typology* and *Shift Share* (SS) analysis. The data used is secondary data, including time series data on the production of aquaculture commodities in Sumenep Regency and East Java Province for 2019–2022. The analysis results show that seaweed is the only basic commodity with an LQ value >1. DLQ analysis shows that most of the aquaculture commodities in Sumenep Regency have future development prospects except grouper. The *Klassen typology* classifies commodities based on growth rate and contribution to the regional economy, indicating the need for more attention to commodities found in quadrant II which have fast growth but low contribution, such as catfish, tilapia, milkfish, shrimp and other fish. *Shift-share* analysis shows that seaweed, milkfish and other fish commodities are in the slow growth category, while gourami, catfish, tilapia, grouper and shrimp commodities have progressive growth even though the *Location Quotient* (LQ) value is low. This research recommends efforts by the Sumenep Regency government to improve financing and investment policies that can influence the growth rate of aquaculture so that it is able to have high competitiveness through policies such as revitalization, industrialization, and standardization.

Keywords: leading commodities; aquaculture; Sumenep; location quotient; shift share & typologi klassen

Dampak Delimitasi Maritim Terhadap Masyarakat Pesisir di Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat

Impact of Maritime Delimitation on Coastal Communities at the Indonesia-Malaysia Border in West Kalimantan

Muhammad Salman Alfarisi, Muhammad Rafi Darajati dan Evi Purwanti

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak delimitasi maritim yang belum disepakati terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, Indonesia. Topik ini dipilih karena lautan, sebagai kekayaan berharga bagi negara-negara maritim, sering menjadi pusat ketegangan dan konflik, terutama terkait wilayah delimitasi maritim yang belum disepakati antara negara tetangga. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dampak delimitasi maritim terhadap hak dan mata pencaharian nelayan di Tanjung Datu serta menyoroti ancaman terhadap tradisi, mata pencaharian, dan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah ini akibat ketidakjelasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan hukum normatif menganalisis kerangka hukum internasional dan nasional terkait delimitasi maritim, sementara pendekatan hukum empiris melibatkan studi kasus di Tanjung Datu. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan fokus pada dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak utama delimitasi maritim adalah pada aspek ekonomi, dengan perubahan hak akses dan ketidakpastian ekonomi; dampak sosial berupa ancaman terhadap keamanan masyarakat pesisir; serta dampak budaya terkait kekhawatiran terhadap pelestarian budaya dan tradisi. Konflik antara Indonesia dan Malaysia juga menimbulkan ketidakpastian hukum wilayah perairan tangkap ikan nelayan. Urgensi penyelesaian delimitasi maritim yang adil dan berkelanjutan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat pesisir, menjaga keberlanjutan warisan budaya lokal, serta menciptakan kondisi stabil dan sejahtera bagi komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.

Kata Kunci: delimitasi maritim; masyarakat pesisir; sumber daya laut; perbatasan

ABSTRACT

This study examines the impact of unresolved maritime delimitation on coastal communities, particularly fishermen in Tanjung Datu, West Kalimantan, Indonesia. The topic was chosen because oceans, as valuable assets for maritime countries, often become centers of tension and conflict, especially regarding unresolved maritime boundaries between neighboring countries. The purpose of this research is to identify the impact of maritime delimitation on the rights and livelihoods of fishermen in Tanjung Datu and to highlight threats to the traditions, livelihoods, and economies of coastal communities in this region due to the unclear maritime boundaries between Indonesia and Malaysia. The research methodology combines normative legal and empirical approaches. The normative legal approach analyzes the international and national legal frameworks related to maritime delimitation, while the empirical legal approach involves a case study in Tanjung Datu. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, focusing on economic, social, and cultural impacts. The research findings indicate that the primary impact of maritime delimitation is economic, with changes in access rights and economic uncertainty; the social impact includes threats to the security of coastal communities; and the cultural impact relates to concerns about preserving cultural heritage and traditions. The conflict between Indonesia and Malaysia also creates legal uncertainty regarding the fishing waters of fishermen. There is an urgency to resolve maritime delimitation fairly and sustainably to accommodate the needs of coastal communities, preserve their cultural heritage, and create stable and prosperous conditions for coastal communities that rely on marine resources.

Keywords: maritime delimitation; coastal communities; marine resources; border

Kesediaan Masyarakat Untuk Menerima Hilangnya Fungsi Keberadaan Ekosistem Pantai di Kabupaten Wakatobi

The Willingness of the Community to Accept the Loss of the Ecological Function of the Coastal Ecosystem in Wakatobi Regency

Ardiman Rusli, Eva Anggraini dan La Ode Muhammad Yasir Haya

ABSTRAK

Program proteksi pantai bertujuan untuk mencegah dampak kenaikan muka air laut, namun menimbulkan dampak terhadap fungsi keberadaan ekosistem pantai pasir putih. Masyarakat menilai bahwa program menutup akses kapal dan ketersediaan lahan di wilayah pantai menjadi berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesediaan masyarakat untuk menerima hilangnya fungsi keberadaan ekosistem pantai. Metode survey digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam pemecahan permasalahan penelitian ini. Jumlah sampel yaitu 135 responden yaitu masyarakat yang berada di Desa Wapia-pia, Desa Waha, dan Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Analisis data penelitian ini menggunakan model logit dengan pendekatan fungsi logistik kumulatif terhadap variabel respon yaitu koefisien jawaban masyarakat dan variabel penjelas yaitu bid yang ditawarkan. Hasil penelitian diperoleh distribusi jawaban "ya" lebih kecil dibanding jawaban "tidak" masyarakat terhadap bid yang ditawarkan. Nilai WTA masyarakat atas hilangnya fungsi keberadaan ekosistem pantai diperoleh sebesar Rp. 68.559,- individu per bulan dan nilai total WTA sebesar Rp.1.092.825.457,- km² per tahun. Nilai keberadaan ekosistem pantai menggambarkan biaya dan manfaat yang terkompensasi agar dampak program proteksi pantai dapat diterima masyarakat. Studi kelayakan program proteksi pantai dalam Peraturan Pemerintah No. 06/2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut dan Permen PUPR No.07/2015 tentang Pengaman Pantai harus memperhitungkan nilai yang sebenarnya dari barang dan jasa yang dihasilkan ekosistem pantai agar kebijakan publik mengarah pada prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keadilan.

Kata Kunci: ekosistem pantai; kesediaan menerima; nilai keberadaan; program proteksi pantai

ABSTRACT

The coastal protection program aims to prevent the impacts of rising sea levels, but it has resulted in negative effects on the functionality of the white sandy beach ecosystem. The community perceives that the program reduces access for ships and the availability of land in the coastal area. This study aims to assess the community's willingness to accept the loss of the beach ecosystem's functionality. A survey method was used to collect data and information for addressing the research problem. The sample consisted of 135 respondents from Wapia-pia Village, Waba Village, and Koroe Onowa Village in Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency. The data analysis used a logit model with a cumulative logistic function approach, where the response variable was the coefficient of community answers, and the explanatory variable was the bid offered. The study found that the distribution of "yes" answers was smaller than the "no" answers from the community regarding the bid offered. The community's WTA for the loss of the beach ecosystem's functionality was calculated at Rp. 68,559 per individual per month, with the total WTA value reaching Rp. 1,092,825,457 per km² per year. The value of the beach ecosystem reflects the costs and benefits that should be compensated to ensure that the impacts of the coastal protection program are acceptable to the community. The feasibility study of the coastal protection program, as outlined in Government Regulation No. 06/2020 on Buildings and Installations at Sea and Minister of PUPR Regulation No. 07/2015 on Coastal Protection, must take into account the true value of the goods and services provided by the coastal ecosystem so that public policies align with the principles of sustainability and fairness.

Keywords: coastal ecosystem; existence value; coastal protection program; willingness to accept

**Analisis Dampak Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/Permen-KP/2021
Terhadap Kegiatan Perikanan Purse Seine di Kabupaten Indramayu**

*Analysis of the Impact of Implementation of Minister of Marine and Fisheries Regulation No.18/Permen-KP/2021 on
Purse Seine Fishery Activities in Indramayu District*

Maulana Dimas Firmansyah, Asep Agus Handaka Suryana, Anta Maulana Nasution dan Ine Maulina

ABSTRAK

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 (Permen KP No. 18/2021) diterbitkan untuk mengatur dan mengelola alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI), guna memberikan manfaat optimal dan melindungi lingkungan. Pada kebijakan tersebut, alat tangkap dogol kembali dilarang penggunaannya, dan menghadirkan Jaring Tarik Berkantong (JTB) sebagai solusi pengganti dogol yang sudah banyak digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pemberlakuan Permen KP No. 18/2021 dengan membandingkan produktivitas hasil tangkapan dan pendapatan nelayan *purse seine* di Kandanghaur, Indramayu, serta persepsi *stakeholder* perikanan di Indramayu terhadap penerapan peraturan menteri tersebut. Asumsi yang dibangun adalah dengan dilarangnya dogol maka produktivitas dan pendapatan nelayan *purse seine* berpotensi akan meningkat. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* (Kualitatif dan Kuantitatif) dengan menggunakan sensus sampling sebagai teknik pengumpulan data. Analisis data menggunakan pendekatan *Mc Nemar* guna membandingkan produktivitas dan pendapatan nelayan sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan, dan *skala likert* dalam mengukur persepsi setiap pihak terkait pemberlakuan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan hal yang sebaliknya, bahwa terjadi penurunan produktivitas hasil perikanan *purse seine* yang mana pada tahun 2020 sebesar 20.035 kg/trip menjadi 13.193 kg/trip pada tahun 2022, serta penurunan hasil lelang pada tahun 2020 sebesar Rp2.509.061.000 menjadi Rp1.661.266.580 pada tahun 2022. Persepsi yang diperoleh dari *stakeholder* perikanan di Indramayu terkait implementasi kebijakan tersebut khususnya pada poin pelarangan dogol menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum optimal. Hal ini ditunjukkan karena masih tingginya aktivitas penggunaan dogol yang semestinya telah beralih menjadi alat tangkap JTB serta penegakan hukum yang kurang optimal.

Kata Kunci: Permen KP No. 18 Tahun 2021; *purse seine*; dogol; jaring tarik berkantong

ABSTRACT

Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 18 of 2021 (Permen KP No. 18/2021) was introduced to regulate and manage fishing equipment (API) and fishing aids (ABPI), in order to provide optimal benefits and protect the environment. The policy specifically prohibits the use of dogol fishing gear and introduces the Pocket Towing Net (JTB) as an alternative. This study analyzes the impact of this regulation on the productivity and income of *purse seine* fishermen in Kandanghaur, Indramayu, and assesses the perceptions of fisheries stakeholders in Indramayu. The assumption that was built was with the prohibition of dogol, the productivity and income of *purse seine* fishermen could potentially increase. The research employs a *mixed-method* approach, utilizing census sampling. *Mc Nemar's* approach is applied to compare the productivity and income of fishermen before and after policy implementation, and a *Likert scale* measures stakeholders' perceptions. Results reveal a decrease in *purse seine* fishery productivity from 20,035 kg/trip in 2020 to 13,193 kg/trip in 2022, along with a decline in auction results from Rp. 2,509,061,000 in 2020 to Rp. 1,661,266,580 in 2022. Fisheries stakeholders in Indramayu express dissatisfaction with the policy's effectiveness, citing continued high usage of dogol fishing gear instead of transitioning to JTB gear. Additionally, enforcement of the regulation appears to be lacking.

Keywords: Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 18 of 2021; *purse seine*; dogol; pocket drag net

Jejaring Sistem Sosial-Ekologi di Kawasan PAAP Kepulauan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara: Pemahaman Holistik untuk Transformasi Berkelanjutan

Social-Ecological System Networks in the PAAP Wawonii Islands Region, Konawe Islands District: Holistic Understanding for Sustainable Transformation

Muhamad Ariston, Luky Adrianto, Dietrich G Bengen dan Handoko Adi Susanto

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode analisis jaringan sosial-ekologi (SENA) untuk memetakan dan menganalisis sistem sosial-ekologi skala kecil (SES) dalam pengelolaan area akses untuk perikanan skala kecil (PAAP) di Wilayah Kepulauan Wawonii, Kabupaten Kepulauan Konawe. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara berbagai aspek sosial, ekologi, ekonomi, tata kelola, dan pemanfaatan sumber daya. Tujuan penelitian adalah menguji dinamika sistem sosial-ekologi di area PAAP Kabupaten Kepulauan Konawe. Penelitian dilakukan dari Februari hingga November 2022 dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan FGD kepada 227 responden yang terdiri dari nelayan PAAP dan Non PAAP. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen, dan laporan terkait. Model jaringan dasar dari SES dibangun menggunakan pendekatan jaringan untuk memahami pola interaksi antara entitas dalam sistem ini. Komunikasi, deteksi komunitas, dan analisis komputasi menggunakan R paket dilakukan untuk menghasilkan pemetaan terbaik dan mendapatkan wawasan tentang pola interaksi yang ada. Hasil pemetaan mengungkapkan kluster signifikan dan hubungan antara entitas dalam sistem perikanan skala kecil. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan kompleks antara berbagai aspek sistem perikanan skala kecil di Wilayah Kepulauan Wawonii, Kabupaten Kepulauan Konawe, yang dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan yang lebih efektif.

Kata Kunci: analisis jaringan sosial-ekologi (SENA); sistem sosial-ekologi (SES); perikanan skala kecil; pemetaan dan analisis jaringan

ABSTRACT

This research utilizes the Social-Ecology Network Analysis (SENA) method to map and analyze small-scale social-ecological systems (SES) in the management of access areas for small-scale fisheries (PAAP) in the Wawonii Islands Region, Konawe Islands District. The study identifies and analyzes the relationships among various social, ecological, economic, governance, and resource utilization aspects. The research objective was to examine the dynamics of social-ecological systems in the PAAP area of Konawe Islands Regency. The research was conducted from February to November 2022 using a combination of primary and secondary data collection methods. Primary data were obtained through observations, interviews, and FGDs involving 227 respondents comprising PAAP and Non-PAAP fishermen. Meanwhile, secondary data were collected through literature reviews, document analysis, and relevant reports. A basic network model of the SES is constructed using a network approach to understand the patterns of interactions among entities within this system. Communication, community detection, and computational analysis using the R package are performed to generate the best mapping and gain insights into the existing patterns of interactions. The mapping results reveal significant clusters and relationships among entities within the small-scale fisheries system. This study also provides a better understanding of the complex relationships among various aspects of the small-scale fisheries system in the Wawonii Islands Region, Konawe Islands District, serving as a foundation for decision-making and more effective management.

Keywords: social-ecology network analysis (SENA); social-ecological system (SES); small-scale fisheries; network mapping and analysis



BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung BRSDM KP Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : <https://kkp.go.id/brsdm/sosek>
email : kebijakan.asek@gmail.com

ISSN 2089-6980

